



Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di MSG Melalui Perspektif Transformasi Konflik Lederach

Margaret Payawa¹, Christian HJ de Fretes², Novriest Umbu Walangara³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, marzpayawa@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, christian.defretes@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia, novriest.umbu@uksw.edu

Corresponding Author: marzpayawa@gmail.com¹

Abstract: *This article discusses an analysis of Indonesia's strategic role in responding to the Papua issue in the Melanesian Spearhead Group through Lederach's conflict transformation perspective. This study is grounded in the multidimensional nature of the Papua conflict, including issues of human rights, development disparities, and demands for self-determination, which then developed into a regional issue through the involvement of the United Liberation Movement for West Papua in the Melanesian Spearhead Group forum. The objective of this study is to analyze Indonesia's diplomatic strategies within that forum and its contribution to conflict transformation. The method used is descriptive qualitative, with secondary data sources consisting of documents, reports, and related publications. The results indicate that Indonesia employs a multidimensional diplomatic strategy through political, economic, and cultural approaches, and leverages its membership status to build relationships, transform the conflict narrative toward development, and create a regional dialogue space. In conclusion, these strategies contribute to conflict transformation at the relational, structural, and narrative levels, although they still face challenges such as identity politics, limitations in the forum's role, and a lack of alignment with domestic conditions. The implications highlight the importance of integrating regional diplomacy with inclusive national policies to achieve sustainable peace in Papua and strengthen Indonesia's legitimacy at the international level.*

Keywords: *The Papuan Conflict, Indonesian Diplomacy, Conflict Transformation, the Melanesian Spearhead Group, Lederach*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di *Melanesian Spearhead Group* melalui perspektif transformasi konflik Lederach. Penelitian ini berangkat dari latar belakang konflik Papua yang bersifat multidimensional, mencakup isu hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, serta adanya tuntutan penentuan nasib sendiri yang kemudian berkembang menjadi isu regional melalui keterlibatan *United Liberation Movement for West Papua* di forum *Melanesian Spearhead Group*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi diplomasi Indonesia di forum tersebut serta kontribusinya terhadap transformasi konflik. Metode yang digunakan adalah

kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi multidimensional melalui pendekatan politik, ekonomi, dan kultural, serta memanfaatkan status keanggotaan untuk membangun relasi, mentransformasi narasi konflik menuju pembangunan, dan menciptakan ruang dialog regional. Kesimpulannya, strategi tersebut berkontribusi pada transformasi konflik secara relasional, struktural, dan naratif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa politik identitas, keterbatasan peran forum, dan ketidaksinkronan dengan kondisi domestik. Implikasinya menunjukkan pentingnya integrasi antara diplomasi regional dan kebijakan nasional yang inklusif guna mencapai perdamaian berkelanjutan di Papua serta memperkuat legitimasi Indonesia di tingkat kawasan internasional.

Kata Kunci: Konflik Papua, Diplomasi Indonesia, Transformasi Konflik, *Melanesian Spearhead Group*, *Lederach*

PENDAHULUAN

Konflik di Papua saat ini telah menjadi konflik multidimensional yang mencakup pelanggaran hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, dan tuntutan kemerdekaan. Hal ini telah bermula sejak integrasi Papua tahun 1969 saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dipandang tidak demokratis dan terbuka sehingga menimbulkan perdepatan berkepanjangan. Selain itu, isu kekerasan bersenjata di Papua antara aparat keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang menyebabkan peningkatan pengungsian sipil dan isu kemanusiaan di wilayah seperti Nduga dan Intan Jaya, yang turut menyoroti pelanggaran HAM. Pembatasan akses bagi jurnalis dan lembaga internasional, serta pemblokiran internet, juga menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan penegakan HAM oleh pemerintah Indonesia. Situasi ini terus mengundang perhatian dari berbagai aktor internasional, termasuk negara-negara Pasifik, organisasi hak asasi manusia global, serta forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menjadikannya wacana global mengenai keadilan, pemenuhan HAM, dan penentuan nasib sendiri (Anugerah, 2019).

Berbagai respon dari kelompok pro kemerdekaan membentuk *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* pada tahun 2014 di Port Vila, Vanuatu sebagai pemersatu dari tiga faksi utama yang selama ini bergerak sendiri-sendiri, yaitu *National Federal Republic of West Papua (NFRWP)*, *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)*, dan *Federal Republic of West Papua (NRFPB)*. Tujuannya adalah memperjuangkan hak Papua di kancah internasional sebagai bagian dari dekolonisasi (westpapuanews, 2023). ULMWP melakukan aksinya melalui *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dengan mendapatkan status *observer* pada tahun 2015 yang menjadi awal meluasnya isu Papua kedalam forum resmi internasional di kawasan Pasifik Selatan. MSG memberi kesempatan bagi entitas non-negara untuk bergabung sebagai *observer* atau bahkan *associate member* apabila memenuhi kriteria tertentu. ULMWP memanfaatkan peluang ini untuk memperjuangkan agenda *selfdetermination* dan menarik simpati negara-negara Melanesia hingga membawa isu ini ke Dewan HAM PBB. Argumen yang di perjuangkan tidak jauh dari isu pelanggaran HAM oleh aparat Indonesia, marginalisasi masyarakat adat, dan tuntutan untuk dilaksanakannya referendum sebagai jalan damai menentukan masa depan Papua (Melanesian Spearhead Group Secretariat, 2015). Oleh karena itu, respon aktif Indonesia di perlukan dalam mengimbangi dominasi narasi ULMWP yang berpotensi mendorong hadirnya konsensus politik kawasan untuk mendukung kemerdekaan Papua kemudian akan berdampak pada legitimasi internasional Indonesia dan memperkuat posisi ULMWP di mata dunia (Nirmeke.com, 2023).

Indonesia secara aktif bergerak di MSG dengan melakukan upaya diplomasi keanggotaan melalui pendekatan kepada negara-negara anggota MSG untuk memperoleh status *associate member* sejak 2015. Posisi ini mempermudah Indonesia untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, menyampaikan narasi mengenai kondisi Papua, juga menyeimbangkan pengaruh ULMWP di MSG. Pendekatan narasi di lakukan Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Papua merupakan bagian sah dari identitas politik Indonesia. Indonesia juga mulai membangun kerja sama ekonomi, sosial, hingga kebudayaan dalam membangun citra positif Indonesia pada forum Melanesia Delegasi yang berasal dari Papua dalam beberapa pertemuan MSG menunjukkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sebagai wujud nyata implementasi otonomi khusus di Papua. Hal ini juga sebagai upaya Indonesai dalam meredam sentimen separatis, memperkuat integrasi nasional, dan menciptakan ruang alternatif selain tuntutan kemerdekaan. Meski demikian, Indonesai juga harus memastikan bahwa upaya ini sesuai dengan yang terjadi di lapangan dalam mempertahankan efektivitas strategi diplomasi pembangunan Indonesia di mata aktor internasional (Dugis & Wardhani, 2025). Upaya diplomasi ini secara efektif menjadi strategi penting dalam mengalihkan fokus isu Papua dari narasi konflik dan pelanggaran HAM menjadi isu pembangunan, kesejahteraan, dan hubungan regional yang konstruktif. Karena saat ini respon MSG dan aktor internasionalnya menjadi sangat penting bagi Indonesia dalam menghentikan dukungan dekolonisasi dan hak *selfdetermination* ULMWP karena suara MSG sering dijadikan rujukan organisasi global seperti PBB dan lembaga HAM dalam merespons dinamika di Papua. Sehingga kehadiran Indonesia di MSG dalam menjaga stabilitas diplomasi kawasan, mempertahankan kedaulatan, dan membentuk persepsi global terkait isu Papua serta transformasi konflik yang berkelanjutan. Kehadiran Indonesia di MSG tidak hanya untuk mengimbangi kekuatannya ULMWP tetapi juga menjaga stabilitas diplomasi kawasan, mempertahankan kedaulatan, dan membentuk persepsi global terkait isu Papua serta melakukan transformasi konflik yang berkelanjutan (Lawson, 2016).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis strategi Indonesia di MSG melalui perspektif *Conflict Transformation Theory* yang dikembangkan oleh John Paul Lederach. Teori ini tidak hanya berfokus penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau pengelolaan konflik (*conflict management*), tetapi juga perubahan mendasar atau transformasi pada hubungan, struktur sosial, narasi, dan pola interaksi yang memelihara konflik. Menurut Lederach konflik merupakan dorongan kreatif dalam membangun struktur sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bukan hanya menghentikan kekerasan (LEDERACH, 1997). Konflik Papua yang bersifat historis, struktural, dan relasional tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan atau pembangunan ekonomi diperlukan perubahan secara menyeluruh. Transformasi hubungan antar pihak, restrukturisasi sistem sosial-politik yang timpang, dan penciptaan ruang yang mendukung keberlanjutan damai dengan masyarakat Papua menghadirkan solusi jangka panjang dalam membangun kepercayaan antar aktor serta mendorong partisipasi masyarakat lokal untuk proses damai. Sehingga teori ini melihat peran penting MSG sebagai institusi tingkat menengah yang menyediakan ruang interaksi aman bagi Indonesia untuk membangun relasi baru dalam memperbaiki kepercayaan, mengurangi kecurigaan, dan menciptakan jaringan diplomasi yang lebih konstruktif dengan negara-negara Melanesia atau di kenal dengan *relationship building*. Interaksi di dalam MSG ini di manfaatkan oleh Indonesia dalam melakukan proses transformasi untuk menggeser narasi konflik Papua dari isu politik menuju wacana pembangunan dan integrasi, sehingga proses transformasi konflik dapat berlangsung secara lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditekankan Lederach. Teori ini juga berperan dalam melihat sejauh mana negara bersedia menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil dengan mengubah sifat interaksi yang memicu konflik.

Sehingga penelitian ini menjadi penting dalam memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional terkait isu Papua sebagai konflik domestik yang berimplikasi menjadi

konflik global melalui peran aktor non-negara dan proses diplomasi. Selain itu, minimnya kajian yang secara khusus membahas strategi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis Papua di arena regional seperti MSG terutama melalui perspektif *conflict transformation*. Sebagian besar studi cenderung terfokus pada pendekatan keamanan atau pembangunan ekonomi tanpa menggali lebih jauh mengenai relasional, kultural, dan struktural sebagaimana ditawarkan oleh Lederach. Penelitian ini menjadi suatu yang baru dalam menganalisis strategi Indonesia di MSG dengan perspektif *Lederach's Conflict Transformation Theory*. Penelitian ini secara lebih mendalam juga menganalisis tantangan serta potensi diplomasi Indonesia dalam menciptakan resolusi jangka panjang atas konflik Papua yang kompleks. Dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* melalui perspektif *Lederach's Conflict Transformation Theory* yang tidak hanya memetakan dinamika diplomasi regional, tetapi juga menawarkan pendekatan alternatif yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada perdamaian berkelanjutan di Papua.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna dari data yang diperoleh. Pendekatan ini tidak menggunakan perhitungan angka, melainkan menekankan pada pemahaman terhadap dinamika, interaksi, serta konteks yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik terkait strategi Indonesia dalam merespons isu Papua di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) melalui perspektif transformasi konflik.

Subjek penelitian dalam studi ini tidak menggunakan konsep populasi dan sampel secara kuantitatif, melainkan berfokus pada aktor dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Subjek utama penelitian adalah Indonesia sebagai aktor negara yang menjalankan strategi diplomasi di MSG, sedangkan subjek pendukung meliputi berbagai dokumen resmi, laporan organisasi, publikasi akademik, serta sumber lain yang berkaitan dengan dinamika isu Papua, peran MSG, dan aktivitas *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Penelitian ini berfokus pada periode tahun 2015 hingga 2024, yaitu sejak Indonesia menjadi *associate member* di MSG hingga perkembangan terkini isu Papua dalam forum tersebut. Adapun penelitian dilakukan secara non-lapangan (*library research*), dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, laporan resmi, dan media daring yang relevan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data. Dalam prosesnya, peneliti menggunakan pedoman analisis yang mengacu pada teori transformasi konflik sebagai kerangka untuk menafsirkan data. Selain itu, instrumen pendukung seperti catatan dokumentasi, daftar literatur, serta perangkat digital digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan pengolahan data.

Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan penentuan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Data yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi untuk memastikan relevansi dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data dianalisis secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, kemudian disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap akhir dari prosedur ini adalah penarikan kesimpulan serta penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks, narasi, dan informasi deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, laporan, jurnal ilmiah, buku, berita, serta publikasi resmi dari pihak terkait seperti pemerintah Indonesia, MSG, dan organisasi

internasional lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti laporan resmi, kebijakan, hasil pertemuan, publikasi akademik, serta informasi dari media massa dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema dan tingkat relevansinya, kemudian ditafsirkan menggunakan teori transformasi konflik untuk memahami makna serta hubungan antar fenomena. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta implikasi dari strategi diplomasi Indonesia dalam konteks konflik Papua.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum seluruh hasil analisis secara menyeluruh guna menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama yang diperoleh selama proses penelitian, serta dilengkapi dengan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian diplomasi regional dan transformasi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian peneliti ini membahas mengenai analisis strategi Indonesia dalam merespons isu Papua di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebagai arena diplomasi regional. Pembahasan difokuskan pada dinamika yang terjadi di MSG akibatnya hadirnya isu Papua, bentuk serta arah strategi diplomasi Indonesia, dan analisis strategi tersebut melalui perspektif *Lederach's Conflict Transformation Theory* yang memandang konflik sebagai proses dinamis mencapai perubahan struktural dan naratif secara berkelanjutan. Bagian pembahasan ini bertujuan menjawab masalah penelitian dengan mengkaji bagaimana Indonesia memanfaatkan MSG tidak hanya sebagai instrumen diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga sebagai ruang interaksi tingkat menengah dalam membangun hubungan, menggeser narasi konflik, serta menciptakan kondisi yang mendukung transformasi konflik Papua jangka panjang. Dengan demikian, bagian ini menelaah efektivitas, tantangan, dan implikasi strategis diplomasi Indonesia di MSG dalam konteks konflik Papua yang telah berkembang dari isu domestik menjadi persoalan regional dan internasional.

1. Strategi Diplomasi Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Konflik Papua kini tidak hanya dapat dipandang hanya sebagai persoalan keamanan atau pembangunan, karena konflik ini berakar pada persoalan sejarah, ketimpangan, serta hubungan yang belum pulih antara negara dan masyarakat Papua. Berbagai pendekatan yang selama ini ditempuh cenderung berfokus pada pengendalian konflik, namun belum menyentuh perubahan mendasar pada relasi, struktur, dan narasi yang mempertahankan konflik tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadi hal baru dalam penelitian yang dilihat oleh penulis lihat, yaitu masih terbatasnya kajian yang memandang konflik Papua sebagai proses jangka panjang yang memerlukan transformasi, bukan sekadar penyelesaian sesaat. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya jalan baru melalui pendekatan transformasi konflik, khususnya dengan memanfaatkan diplomasi regional sebagai ruang membangun dialog dan kepercayaan. Perspektif ini menjadi landasan awal untuk membahas strategi diplomasi Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) pada bagian berikutnya.

Sehingga berdasarkan pandangan tersebut, penelitian lebih lanjut membahas bagaimana Indonesia merespon dinamika konflik Papua melalui jalur diplomasi regional, khususnya dengan memanfaatkan MSG sebagai arena strategis diplomasi dalam membangun relasi, mengelola narasi, dan mendorong proses transformasi konflik secara bertahap. Strategi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Papua dengan kehadiran ULMWP di MSG yang membawa isu HAM serta keinginan penentuan nasib sendiri adalah

melalui pendekatan terstruktur dan berbasis pada prinsip *constructive engagement* di responi oleh Indonesia melalui strategi jalur diplomasi aktif. Indonesia mengimbangi pengaruh United ULMWP di MSG dengan menekankan prinsip kedaulatan negara dan integritas wilayah melalui upaya diplomasi aktif. Salah satu langkah utamanya adalah memperkuat keterlibatan resmi Indonesia di MSG melalui perolehan status *Associate Member* pada tahun 2015. Status ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk berpartisipasi langsung dalam forum MSG, menyampaikan posisi resminya terkait Papua, serta mencegah dominasi narasi ULMWP yang mengedepankan isu penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM.

Dengan memanfaatkan posisinya sebagai *associate member* Indonesia menempatkan MSG sebagai arena strategis untuk memperkuat hubungan regional, membangun pemahaman budaya Melanesia, dan mengikis stigma negatif terkait isu Papua. Indonesia menggunakan diplomasi politik, ekonomi dan kultural dalam memperkuat legitimasi kedaulatannya atas Papua. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa isu Papua merupakan isu domestik dan tidak menutup ruang dialog kemanusiaan serta kerja sama pembangunan sebagai bentuk komitmen Indonesia atas kesejahteraan masyarakat Papua (Dugis dan Wardhani 2025).

Memanfaatkan MSG sebagai sarana diplomasi, Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan pengakuan kedaulatan nasional dan penghormatan terhadap ikatan etnis Melanesia yang ada di Papua. Hal ini diwujudkan Indonesia melalui partisipasi aktif dalam program *Constructive Engagement Platform* di mana Indonesia bersama anggota MSG lainnya mendorong dialog terbuka namun berbasis fakta dan penghormatan terhadap hukum internasional. Program ini membuka akses bagi negara anggota MSG lainnya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan di Papua melalui kunjungan pejabat, misi budaya dan laporan HAM yang transparan. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam merespon isu mengenai Papua dengan berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan. Juga sebagai bentuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia melalui sikap kooperatif dan terbuka terhadap mekanisme regional tanpa kehilangan kendali atas isu kedaulatan. Selain itu dalam meresponi kehadiran ULMWP di MSG dengan status *observer* Indonesia memilih strategi diplomasi afirmatif dan tidak menolak kehadiran ULMWP secara frontal. Indonesia cenderung memposisikan ULMWP sebagai bagian dari proses dialog pada tingkat regional. Hal ini membuat ULMWP tidak memiliki ruang untuk menginternasionalisasi isu Papua di luar kerangka diplomasi yang dikendalikan MSG. Kehadiran ULMWP di dimanfaatkan Indonesia untuk menunjukkan bahwa isu Papua dapat dibahas secara terbuka secara diplomatis dan tetap menghormati integritas teritorial. Pendekatan ini terbukti berjalan efektif karena hingga tahun 2025 ULMWP belum memperoleh status anggota penuh di MSG karena dinilai belum memenuhi kriteria keanggotaan. Hal ini mencerminkan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mengarahkan dinamika politik MSG agar tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan nasional (Wardhani 2016).

Dalam mendukung proses diplomasi Indonesia di MSG, Indonesia juga turut berkolaborasi dengan negara anggota seperti Papua New Guinea, Fiji, dan Solomon Islands dalam bidang ekonomi keamanan maritim, pelatihan militer, dan pembangunan kapasitas manusia. Menggunakan pendekatan *Melanesia to Melanesia Cooperation* Indonesia mengedepankan nilai kebersamaan etnis dalam memperkuat hubungan sosial budaya dan menumbuhkan kepercayaan publik. Melalui kerja sama *Melanesian Free Trade Agreement (FTA)* dan bantuan teknis pembangunan menjadi sarana diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang konstruktif dan tidak hegemonik. Sehingga kerja sama ini berfungsi mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara MSG sekaligus menetralkan pengaruh politik dari kelompok pro-kemerdekaan seperti ULMWP (Roziqi 2020).

Secara keseluruhan diplomasi Indonesia di MSG mencerminkan diplomasi yang adaptif dan multidimensional dengan menjaga kedaulatan Indonesia di Papua melalui kekuatan politik, kemanusiaan, ekonomi dan budaya antar bangsa Melanesia. Indonesia

berhasil mengubah narasi negatif tentang kebijakan di Papua dengan menunjukkan komitmen serius terhadap pembangunan yang inklusif dan stabilitas kawasan. Dengan memperkuat diplomasi multilateral berbasis dialog dan kolaborasi Indonesia mampu meningkatkan citranya sebagai kekuatan regional yang mampu mengelola isu sensitif dengan cara damai, partisipatif, dan bermartabat. Untuk memahami lebih dalam makna dan implikasi strategi diplomasi Indonesia di MSG, diperlukan analisis yang melampaui deskripsi kebijakan dan tindakan diplomatik semata. Subbab selanjutnya akan menganalisis strategi Indonesia tersebut melalui perspektif *Lederach's Conflict Transformation Theory*, guna menilai sejauh mana diplomasi Indonesia di MSG berkontribusi pada proses transformasi konflik Papua secara relasional, struktural, dan naratif dalam jangka panjang.

2. Analisis Strategi Indonesia melalui Perspektif Lederach's *Conflict Transformation Theory*

Strategi diplomasi Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dapat di lihat sebagai upaya yang tidak hanya bersifat defensif dalam mempertahankan kedaulatan, tetapi juga sebagai proses transformasi konflik seperti yang dipahami dalam perspektif Lederach. Lederach memandang konflik sebagai proses dinamis yang terhubung dengan relasi sosial, struktur politik, dan narasi budaya, sehingga penyelesaiannya tidak cukup melalui resolusi instan, melainkan melalui perubahan berkelanjutan pada dimensi personal, relasional, struktural, dan kultural (Lederach 2014).

Dalam konteks Papua, kehadiran isu ini di MSG menunjukkan bahwa konflik telah bergeser dari ranah domestik menuju arena regional, sehingga menuntut pendekatan transformasi konflik yang mampu mengelola interaksi antaraktor secara konstruktif. Partisipasi Indonesia sebagai *associate member* MSG mencerminkan pemahaman bahwa konflik Papua tidak dapat dikelola hanya dengan pendekatan keamanan dan pembangunan domestik, tetapi memerlukan pengelolaan relasi regional yang lebih inklusif dan dialogis sesuai dengan prinsip *conflict transformation Lederach*.

Pada dimensi struktural, strategi Indonesia di MSG relevan dengan gagasan *structural transformation Lederach* yang menekankan perubahan pada institusi dan mekanisme yang menopang konflik. MSG sebagai organisasi regional menyediakan struktur diplomasi yang memungkinkan pengelolaan isu Papua secara kolektif, terlembaga, dan berbasis konsensus. Melalui keterlibatan dalam *Constructive Engagement Platform*, Indonesia tidak hanya mempertahankan posisinya secara politik, tetapi juga berupaya mengubah struktur interaksi regional yang sebelumnya memungkinkan internasionalisasi isu Papua secara sepihak. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana Indonesia memanfaatkan institusi regional untuk menciptakan saluran formal dialog, pertukaran informasi, dan mekanisme kepercayaan yang dapat meredam konflik pada level regional, sebagaimana Lederach menekankan pentingnya institusi yang adil dan kredibel dalam menopang perdamaian jangka panjang (LEDERACH 1997).

Transformasi narasi juga menjadi aspek penting dalam strategi Indonesia di MSG jika dianalisis melalui perspektif Lederach. Konflik Papua selama ini dipelihara oleh narasi sejarah, identitas, dan pengalaman ketidakadilan yang sering kali berlawanan dengan narasi nasional Indonesia. Lederach menekankan bahwa konflik berkepanjangan membutuhkan *narrative transformation*, yakni pembukaan ruang bagi narasi alternatif dan rekonstruksi identitas bersama. Melalui diplomasi kultural dan pendekatan *Melanesia to Melanesia Cooperation*, Indonesia berupaya membingkai Papua bukan semata sebagai isu separatisme, tetapi sebagai bagian dari komunitas Melanesia yang diakui dan dihormati dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya ini menunjukkan relevansi langsung dengan gagasan Lederach tentang pentingnya membangun narasi inklusif yang dapat menjembatani perbedaan identitas dan mengurangi polarisasi (Lederach 2014).

Strategi Indonesia di MSG juga mencerminkan prinsip *multilevel engagement* yang menjadi salah satu pilar utama teori Lederach. MSG berfungsi sebagai arena tingkat menengah (*middle-range leadership*) yang menghubungkan kepentingan elit politik negara-negara Melanesia dengan aspirasi kelompok masyarakat dan aktor non-negara seperti ULMWP. Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia tidak hanya beroperasi di tingkat elit negara, tetapi juga menyentuh aktor regional dan komunitas kultural Melanesia yang memiliki kedekatan identitas dengan Papua. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Lederach bahwa aktor tingkat menengah memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi dan penurun ketegangan antara struktur negara dan dinamika masyarakat, sehingga berkontribusi pada stabilitas relasi jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana teori Lederach sejalan dengan praktik diplomasi multilateral yang menyediakan ruang institusional untuk memungkinkan transformasi relasional, struktural, dan naratif berlangsung secara kolektif dan berbasis konsensus. Sebagaimana ditekankan Lederach bahwa konflik tidak dapat ditangani secara cepat melainkan melalui konsistensi, kesabaran, dan integrasi antara manajemen krisis jangka pendek dan pembangunan perdamaian jangka panjang. Melalui forum multilateral seperti MSG, isu Papua dikelola dalam mekanisme dialog yang menghormati kesetaraan antarnegara, kedaulatan, serta prinsip non-kekerasan (Suryokusumo 2005). Hal ini selaras dengan pendekatan transformasi konflik yang menempatkan hubungan dan kepercayaan sebagai fondasi perdamaian jangka panjang. Hal ini juga menunjukkan keselarasan dengan teori Lederach dalam menciptakan perubahan struktural dan naratif melalui institusi regional. Sebagai associate member, Indonesia tidak hanya mempertahankan posisi kedaulatannya, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam platform konstruktif yang mendorong transparansi, kerja sama pembangunan, dan dialog HAM. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Lederach bahwa perdamaian dibangun melalui sistem komunikasi yang berkelanjutan dan institusi yang kredibel, bukan sekadar penghentian konflik jangka pendek.

Sehingga berdasarkan *Lederach's Conflict Transformation Theory*, strategi Indonesia di MSG dapat dipahami sebagai upaya transformasi konflik yang bersifat adaptif dan multidimensional. Diplomasi Indonesia tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan, tetapi juga untuk mengelola relasi, struktur, dan narasi konflik Papua dalam konteks regional. Meskipun strategi ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterlibatan masyarakat Papua secara langsung, pendekatan Indonesia di MSG telah menunjukkan relevansi dengan prinsip-prinsip Lederach dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, MSG menjadi bukan sekadar arena diplomasi identitas, melainkan ruang transformasi konflik yang memungkinkan perubahan relasional, struktural, dan naratif secara bertahap dalam pengelolaan isu Papua.

3. Tantangan Transformasi Konflik Papua di *Melanesia Spearhead Group (MSG)*

Transformasi konflik Papua melalui arena diplomasi regional *Melanesian Spearhead Group (MSG)* menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, politis, dan kultural. MSG dipandang sebagai forum regional yang berperan menjadi jembatan antara kepentingan Indonesia dengan aktor non-negara yaitu ULMWP. Secara *de facto* MSG membuka ruang diplomasi bagi Indonesia melalui pemberian status *associate member* dan ULMWP sebagai *observer* untuk membahas isu Papua secara tetata dan terkelola sehingga mencegah meluasnya konflik ke tingkat yang lebih luas (Asia Pacific Solidarity Networks, 2024). MSG memainkan perannya dalam menahan potensi yang dapat menginternasionalisasi isu Papua pada forum global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga isu ini dapat didiskusikan melalui dialog antar negara Melanesia dan Indonesia yang menjadi bukti bahwa MSG berfungsi sebagai ruang diplomasi regional agar konflik tidak langsung masuk ke tingkat yang lebih luas. Jika MSG tidak berperan sebagai mediator regional, isu Papua berpotensi lebih cepat terdorong ke ranah internasional seperti kampanye dekolonisasi atau hak

penentuan nasib sendiri di PBB, yang dapat meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia serta memperluas dukungan negara-negara Pasifik terhadap agenda politik ULMWP. Dengan demikian, MSG secara nyata berfungsi sebagai penahan potensi konflik dari tingkat regional menuju arena global. Kompleksitas konflik Papua yang telah berkembang dari isu domestik menjadi isu regional dan internasional menjadikan proses transformasi konflik tidak dapat berlangsung secara linear. Dalam perspektif *Lederach's Conflict Transformation Theory*, tantangan tersebut muncul ketika upaya perubahan relasional dan struktural belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan.

Tantangan pertama ada pada kuatnya politik identitas Melanesia dalam dinamika MSG. Solidaritas etnis dan historis antarmasyarakat Melanesia menjadi faktor yang memperkuat simpati sebagian negara anggota terhadap perjuangan ULMWP. Identitas ini sering kali membentuk persepsi kolektif yang melihat Papua sebagai bagian dari komunitas Melanesia yang terpisah secara politik dari Indonesia. Kondisi tersebut menyulitkan Indonesia untuk sepenuhnya menggeser narasi konflik ke arah pembangunan dan integrasi, karena isu Papua kerap dibingkai dalam diskursus dekolonisasi dan hak penentuan nasib sendiri (Dugis dan Wardhani 2021).

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan MSG dalam mendorong transformasi konflik yang substantif. Sebagai organisasi subregional dengan tanggung jawab yang cenderung terbatas, MSG tidak memiliki mekanisme formal untuk memediasi konflik internal *associate member* secara mendalam. Akibatnya, peran MSG lebih dominan sebagai arena artikulasi kepentingan politik dibandingkan sebagai aktor transformasi konflik yang aktif. Dalam konteks Lederach, kondisi ini membatasi kapasitas MSG untuk memfasilitasi perubahan struktural yang dapat berdampak langsung pada akar konflik Papua.

Tantangan berikutnya adalah ketidaksinkronan antara diplomasi eksternal dan dinamika internal Papua. Upaya Indonesia untuk membangun narasi positif di forum MSG sering kali dihadapkan pada laporan dan persepsi mengenai pelanggaran HAM, ketimpangan pembangunan, serta konflik kekerasan di Papua. Ketidaksesuaian ini berpotensi melemahkan kredibilitas diplomasi Indonesia dan memperkuat narasi yang di bawa oleh ULMWP. Dalam kerangka transformasi konflik, keberlanjutan perubahan di tingkat regional mengharuskan adanya konsistensi antara kebijakan diplomatik dan realitas empiris di lapangan.

Selain itu, keberadaan aktor non-negara seperti ULMWP menjadi tantangan tersendiri dalam proses transformasi konflik di MSG. ULMWP memanfaatkan ruang MSG untuk membangun legitimasi internasional dan mempertahankan tekanan politik terhadap Indonesia. Keterlibatan aktor non-negara ini menciptakan dinamika konflik yang asimetris, di mana Indonesia sebagai aktor negara harus menyeimbangkan pendekatan diplomatik antara mempertahankan kedaulatan dan menghindari eskalasi konflik di forum regional. Situasi ini memperumit proses dialog yang konstruktif dan transformatif.

Tantangan berikutnya mengenai Transformasi konflik yang dikemukakan Lederach menuntut adanya komitmen politik jangka panjang. Namun, dinamika MSG yang dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan nasional, kepentingan politik domestik negara anggota, serta fluktuasi isu kawasan sering kali mendorong respons yang bersifat reaktif. Hal ini berpotensi menghambat konsistensi strategi transformasi konflik Papua di tingkat regional.

Dengan demikian, tantangan transformasi konflik Papua di MSG mencerminkan keterbatasan diplomasi regional dalam menangani konflik yang berakar kuat pada persoalan struktural dan kultural. Tantangan-tantangan tersebut menegaskan bahwa meskipun MSG dapat berfungsi sebagai ruang penting dalam mengelola dinamika konflik Papua, transformasi konflik yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara diplomasi regional, kebijakan nasional yang inklusif, dan perubahan relasional di tingkat lokal.

4. Keberhasilan dan Implikasi Strategi Diplomasi Indonesia dalam Transformasi Konflik Papua

Keberhasilan strategi diplomasi Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dalam konteks transformasi konflik Papua dapat dilihat dari kemampuannya mengelola isu sensitif secara relatif stabil di tingkat regional tanpa memicu dampak politik yang lebih luas. Melalui mekanisme diplomasi multilateral, Indonesia berhasil mempertahankan posisi kedaulatannya atas Papua sekaligus mencegah dominasi narasi separatis ULMWP di MSG. Pendekatan ini efektif dalam kerangka transformasi konflik Lederach karena Indonesia tidak memilih konfrontasi langsung, melainkan membangun ruang dialog, kerja sama, dan keterlibatan konstruktif yang memungkinkan perubahan relasional dan struktural secara bertahap. Keberhasilan Indonesia menjaga status ULMWP tetap sebagai *observer* hingga 2025 menunjukkan bahwa diplomasi multilateral di MSG mampu mengarahkan dinamika konflik Papua ke dalam jalur institusional yang lebih terkontrol, *konsensus-based*, dan sejalan dengan prinsip non-kekerasan. Hal ini mencerminkan efektivitas diplomasi multilateral sebagai instrumen untuk meredam konflik pada level regional sekaligus membuka ruang transformasi konflik jangka panjang.

Diplomasi Indonesia di MSG menunjukkan bahwa organisasi regional mekanisme *conflict management* sekaligus *conflict transformation* dalam isu Papua. Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi MSG, negara-negara anggota seperti Vanuatu dan Solomon Islands kerap menyuarakan perhatian terhadap isu hak asasi manusia di Papua, sementara Indonesia berupaya menyeimbangkan tekanan tersebut melalui pendekatan diplomasi yang menekankan kerja sama pembangunan, dialog, serta keterlibatan regional. Keberhasilan Indonesia mempertahankan posisi ULMWP sebagai *observer* menunjukkan bahwa MSG tetap mempertahankan prinsip konsensus dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak terjadi perluasan politik yang dapat memicu internasionalisasi isu Papua lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana diplomasi Indonesia mampu memanfaatkan struktur institusional MSG untuk menjaga stabilitas regional sekaligus mengendalikan dinamika politik yang berpotensi memperkuat legitimasi gerakan separatistis di tingkat internasional.

Selain itu implikasi dari diplomasi Indonesia di MSG juga sebagai upaya memperluas keterlibatan sosial dan identitas regional Papua dalam kerangka Melanesia. Melalui partisipasi aktif provinsi-provinsi Papua dalam berbagai forum budaya, ekonomi, dan pembangunan di MSG, Indonesia berusaha memperkuat narasi bahwa masyarakat Papua merupakan bagian dari komunitas Melanesia yang tetap berada dalam kerangka negara Indonesia (Sambhi, 2023). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meredam tekanan diplomatik dari negara-negara Pasifik, tetapi juga membangun legitimasi sosial dan kultural yang lebih luas bagi integrasi Papua. Dalam perspektif transformasi konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, langkah ini mencerminkan pentingnya membangun hubungan lintas komunitas dan memperkuat identitas kolektif sebagai bagian dari proses perubahan konflik jangka panjang. Dengan demikian, diplomasi Indonesia di MSG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk membangun stabilitas politik, memperkuat legitimasi regional, serta menciptakan ruang dialog yang berpotensi mendukung transformasi konflik Papua secara bertahap dan berkelanjutan.

Strategi diplomasi Indonesia di MSG juga memperkuat peran organisasi regional sebagai arena penting dalam transformasi konflik Papua. MSG tidak hanya menjadi simbol solidaritas etnis Melanesia, tetapi berfungsi sebagai institusi multilateral yang memfasilitasi dialog, pertukaran informasi, serta mekanisme kepercayaan antara Indonesia dan negara-negara Melanesia. Berdasarkan perspektif Lederach, keberadaan institusi regional yang kredibel dan inklusif merupakan prasyarat penting bagi perdamaian berkelanjutan. Diplomasi multilateral Indonesia melalui platform seperti *Constructive Engagement* memperlihatkan

implikasi positif berupa terbukanya ruang diplomasi HAM dan pembangunan tanpa harus mengorbankan prinsip kedaulatan.

Selain itu implikasi diplomasi multilateral Indonesia di MSG terlihat pada upaya transformasi narasi konflik Papua di tingkat kawasan. Indonesia mulai menggeser narasi konflik dari isu penindasan dan separatisme menuju wacana pembangunan inklusif, kerja sama regional, dan pengakuan identitas Melanesia Papua. Dalam kerangka Lederach, perubahan narasi ini penting untuk membangun identitas bersama dan mengurangi polarisasi konflik. Namun, efektivitas jangka panjang strategi ini sangat bergantung tindakan nyata antara negara dengan masyarakat Papua. Tanpa dukungan dan partisipasi aktor lokal Papua dalam proses *multilevel engagement*, diplomasi multilateral berisiko hanya efektif di tingkat elit dan regional. Dengan demikian, implikasi strategis diplomasi Indonesia di MSG menegaskan bahwa diplomasi multilateral bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana penting dalam membangun proses transformasi konflik Papua yang relasional, struktural, dan naratif secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui Perspektif Transformasi Konflik Lederach menunjukkan bahwa strategi Indonesia di MSG tidak hanya berfungsi sebagai upaya mempertahankan kedaulatan, tetapi juga sebagai proses transformasi konflik yang bersifat multidimensional. Melalui pendekatan diplomasi regional yang adaptif dan berbasis *constructive engagement*, Indonesia memanfaatkan statusnya sebagai *associate member* untuk mengelola dinamika isu Papua dalam mengimbangi pengaruh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), serta menggeser narasi konflik dari isu separatisme dan pelanggaran hak asasi manusia menuju wacana pembangunan dan kesejahteraan. Strategi ini mencerminkan dimensi transformasi konflik pada aspek relasional, struktural, dan naratif sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Lederach.

Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kuatnya politik identitas Melanesia di antara negara anggota MSG, keterbatasan peran MSG sebagai mediator konflik, serta belum sepenuhnya sinkronnya antara diplomasi eksternal Indonesia dengan kondisi empiris di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi konflik tidak dapat hanya bergantung pada diplomasi regional, melainkan memerlukan integrasi dengan kebijakan domestik yang inklusif serta keterlibatan masyarakat Papua secara langsung agar perubahan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan.

Sehingga dalam penelitian ini ditegaskan bahwa diplomasi multilateral dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam transformasi konflik, tidak hanya untuk meredakan ketegangan tetapi juga untuk membangun perubahan jangka panjang. Implikasi bagi pengembangan ilmu secara umum adalah pentingnya pendekatan yang menyeluruh, berbasis komunikasi terbuka, serta saling terhubung antar kebijakan dalam menangani konflik kompleks, sehingga dapat menciptakan stabilitas dan perdamaian yang lebih berkelanjutan baik dalam praktik diplomasi maupun kajian ilmiah.

REFERENSI

Anugerah, B. (2019, Desember). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 54-57. Diambil kembali dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fbc00caa6ddda90dcd6e9f73e19d711d1b9ed0658e5d8d7d5fd4eba1c916c20eJmltdHM9MTc1OTE5MDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=Papua%3a+Mengurai+Konflik+dan+Merumuskan+Solusi&u=a1aHR0cHM6Ly9qdXJuYWwu>

- Asia Pasific Solidarity Networks. (2024). *Indonesia is associate member, West Papua observer in MSG*. Diambil kembali dari Asia Pasific Solidarity Net: https://www.asia-pacific-solidarity.net/index.php/news/2015-06-27/indonesia-associate-member-west-papua-observer-msg.html?utm_source=chatgpt.com
- Corbin, J., & Strauss, A. (1990, Desember). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative. *Zeitschrift für Soziologie*, . 418-427. Dipetik November 2023, dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9bb88416c8e9a37bJmltdHM9MTY5OTQ0DAwMCZpZ3VpZD0wZTQ0MTk3NS01YjFmLTZjNTMtMmZiNS0wYmJkNWE0OTZkMGUmaW5zaWQ9NTIxMQ&ptn=3&hsh=3&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=Strauss+%26+Corbin%2c+1990&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZGVncnV>
- Dugis, V., & Wardhani, B. (2021). Indonesia's Diplomacy for Papua Issue in the Melanesian Spearhead Group: Challenges Remain. *Jurnal Hubungan Internasional*, 44-46. Diambil kembali dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/23042/11469>
- Dugis, V., & Wardhani, B. (2025). Indonesia's Diplomacy for Papua Issue in the Melanesian Spearhead Group: Challenges Remain. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*. Diambil kembali dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/23042/11469>
- Haryoko, P., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis* (Pertama ed.). Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. Dipetik November 2023
- Helmiati. (2017). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN PERDAMAIAN (PEACE EDUCATION). *repository uin*, 8-10. Diambil kembali dari <https://repository.uin-suska.ac.id/26553/1/Implementasi%20Pendidikan%20Perdamaian%20%28Peace%20Education%29%20dalam%20Rangka%20Transformasi%20Konflik%20Thailand%20Selatan.pdf>
- Hutagalung, S. (2024, September 5). *Indonesia's Strategic Engagement With The Pacific In 2024: Leveraging MSG And PIF For Regional Stability – Analysis*. Diambil kembali dari eurasiareview: <https://www.eurasiareview.com/05092024-indonesias-strategic-engagement-with-the-pacific-in-2024-leveraging-msg-and-pif-for-regional-stability-analysis/>
- Ihalauw, J. J. (2003). *Bangunan Teori*. Fakultas Ekonomu Universitas Kristen Satya Wacana. Dipetik November 2023
- Ketaren, E. (2025). Prinsip Kerja Sama dalam Diplomasi Multilateral. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*. Diambil kembali dari <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/59864/26300>
- Lawson, S. (2016). West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: competing logics in regional and international politics. *AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS*. doi:https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F10357718.2015.1119231?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- LEDERACH, J. P. (1997). *SUSTAINABLE RECONCILIATION IN DIVIDED SOCIETIES*. Washington DC: United States Institute of Peace.
- Lederach, J. P. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation: Clear Articulation of the Guiding Principles by a Pioneer in the Field*. United States: Intercourse, PA : Good Books.
- Lederach, J. P. (2014). *Conflict Transformation*. New York: Skyhorse Publishing. Diambil kembali dari <https://professorbellreadings.wordpress.com/wp->

- content/uploads/2017/10/the-little-books-of-justice-peacebuilding-john-lederach-the-little-book-of-conflict-transformation-good-books-2014-1.pdf
- Mampioper, D. (2025, Juni). *Dua Organisasi Pro Papua Barat Merdeka Desak MSG Tingkatkan Keanggotaan ULMWP*. Diambil kembali dari Jubi Papua: <https://jubi.id/pasifik/2025/dua-organisasi-pro-papua-barat-merdeka-desak-msg-tingkatkan-keanggotaan-ulmwp/>
- Melanesian Spearhead Group Secretariat. (2015). SUMMARY BRIEF ON UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP). *20th MSG Leaders' Summit* (hal. 2). Port Vila: MSG Secretariat. Diambil kembali dari https://msgsec.info/wp-content/uploads/2023LEADERSSUMMIT_PAPERS/SOM/SOM-0223.08-Annex-Summary-on-Leaders-decision-on-the-United-Liberation-Movement-on-West-Papua.pdf
- Muzaffar, E., Sudirman, A., & Djuyandi, Y. (2024). SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM KONFLIK PAPUA DI MASA KEPRESIDENAN JOKO WIDODO (2014-2022). *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*. Diambil kembali dari <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/51753/21897>
- Nirmeke.com. (2023, Agustus). *Dukung Keanggotaan Penuh ULMWP di MSG, Aksi Dukungan Digelar Secara Nasional di Seluruh West Papua (Sorong – Merauke)*. Diambil kembali dari Nirmeke.com: <https://nirmeke.com/2023/08/23/dukung-keanggotaan-penuh-ulmwp-di-msg-aksi-dukungan-digelar-secara-nasional-di-seluruh-west-papua-sorong-merauke/>
- Pan, Y., & Xiao, Q. (2023). Separatist Movements Influenced by International Intervention: The Case of West Papua. *Canadian Center of Science and Education*, 29-32.
- Putra, G., Legionosuko, T., & Madjid, A. (2019). STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA ANGGOTA MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) DALAM MENGHADAPI PROPAGANDA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM): STUDI KASUS NEGARA REPUBLIK VANUATU. *Jurnal Peperangan Asimetris*. Diambil kembali dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3c23255e2d67e45850fbc030f20697bbdc1ce6c50eb4fc3c90e486e7ca3abc6cJmltdHM9MTc1OTg4MTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=Strategi+Pemerintah+Indonesia+terhadap+Negara-Negara+Anggota+Melanesian+>
- Rahim, A., & Timur, F. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia. *INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*, 20-23. Diambil kembali dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=45900daaa8d9cfb35f26b344f0cbc153ad0ca2dceefaf9ebb0f022aaf925f915JmltdHM9MTc1OTYyMjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=what+is+ULMWP&u=a1aHR0cHM6Ly9pamlzLmZpc2lwLXVubXVsLmFjLmllkL3NpdGUvaW5kZkX>
- Rona, A. P., & Maryanah, T. (2022). MANAJEMEN KONFLIK PAPUA MELALUI PENDEKATAN BIROKRASI PERWAKILAN: Analisis Representasi Deskriptif dan Substantif. *Journal Publicuho*. Diambil kembali dari https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/584/404/4602?__cf_chl_tk=ZR2yG9ckd.zB_0Pfxupmez1ujuasOb9dhPgoh2Rj76g-1759670762-1.0.1.1-ma83x_r2E0O1ebI5k606tkoTUF9ggjU0CzlUgK9ayyM

- Roziqi, M. (2020). Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United. *Undip E-Journal*. Diambil kembali dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fc9ecad4273c7d11f6401c0841d8567d5b9aca872f8a6dc8413545d236c10ebcJmltdHM9MTc1OTg4MTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=Indonesia+in+melanesia+sperhead+group+journal&u=a1aHR0cHM6Ly9lam91cm5hbD>
- Roziqi, M. (2020). Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua. *Journal of International Relations*. Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/26930>
- Sambhi, N. (2023, July). Indonesia's Indo-Pacific Aspirations and the Reality of Its (Non)Strategy. *Asia Policy, Vol. 18, No. 3*, 46-55. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/27254668>
- Sudira, I., Pamungkas, C., Aidulsyah, F., Rumkabu, E., & Langowuyo, Y. (2020). PEMBANGUNAN, MARGINALISASI, DAN dISINTEGRASI PAPUA. Jakarta: IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor. Diambil kembali dari <https://www.tifafoundation.id/wp-content/uploads/2022/06/Pembangunan-Marginalisasi-dan-Disintegrasi-Papua.pdf>
- Suryokusumo, S. (2005). *Praktek Diplomasi*. Jakarta: Iblam.
- Wardhani, B. (2016). Quo Vadis Melanesian Spearhead Group? *Global & Strategis*. Diambil kembali dari <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=80e9b3b011ab42d6045c0c8d419f09668fea67fe6ef21077c0044cf64789183eJmltdHM9MTc1OTg4MTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0e441975-5b1f-6c53-2fb5-0bbd5a496d0e&psq=Melanesian+Spearhead+Group+journal&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWZyY2hnYXRIL>
- westpapuanews. (2023, September 4). WEST PAPUAN LEADERSHIP NOW CENTRED IN WEST. hal. 1-2. Diambil kembali dari <https://westpapuanews.org/wp-content/uploads/2023/09/ULMWP-press-release-04-09-2023.pdf>